

Nomor : 09 /PM.00.02/K.SB-02/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Tebing Tinggi, 10 Oktober 2022

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

di

Tempat

Dengan Hormat,

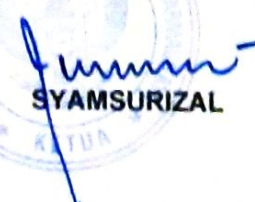
Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Gugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya agar melaksanakan penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan Yth

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang